



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, setiap Perangkat Daerah mengajukan Surat Perintah Pembayaran ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlumenetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : Tahun 2018

Tanggal :

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 4);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

18. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Uang Persediaan (UP) dipergunakan oleh bendahara untuk melakukan pembayaran selain pembayaran LS dan TU-Nihil.
KETIGA : Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terdapat sisa uang persediaan maka bendahara diwajibkan mengembalikan ke Kas Daerah.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 02 JANUARI 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TANGGAL : 02 JANUARI 2018

TENTANG : BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	USULAN BESARAN UP	BESARAN UP YANG DIMINTA
1	Dinas Pendidikan	2.304.910.100	500.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.119.855.849	353.800.000
3	Dinas Pekerjaan umum	88.986.870	68.800.000
4	Dinas Penataan Ruang	228.836.979	63.000.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	166.564.233	29.000.000
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	39.636.643	30.000.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	65.716.132	60.000.000
8	Dinas Sosial	94.982.100	83.000.000
9	Dinas Ketenagakerjaan	108.573.877	70.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.844.238	85.000.000
11	Dinas Ketahanan Pangan	81.488.050	80.000.000
12	Dinas Pertanahan	97.039.400	60.000.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	240.805.250	175.000.000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.014.7000	50.000.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	174.535.100	140.000.000
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	447.576.500	300.000.000
17	Dinas Perhubungan	156.732.200	40.000.000
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	369.485.000	85.000.000
19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah	87.164.000	75.000.000
20	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	144.738.091	130.000.000
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	170.982.800	75.000.000
22	Dinas Statistik	50.284.382	40.000.000
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.122.000	60.000.000
24	Dinas Perikanan	267.712.868	150.000.000
25	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	141.857.100	60.000.000
26	Dinas Pertanian	196.750.200	174.000.000
27	Dinas Perdagangan	166.459.762	95.000.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	202.300.500	140.000.000
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	143.807.750	60.000.000
30	Sekretariat Daerah	Masing-masing bagian	-
31	Sekretariat DPRD	1.360.683.750	1.000.000.000
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	102.968.260	100.000.000
33	Dinas Pemadam Kebakaran	309.687.300	94.000.000
34	Kecamatan Pangkajene	117.263.000	116.000.000
35	Kecamatan Minasatene	66.523.450	66.000.000
36	Kecamatan Balocci	90.954.500	70.000.000
37	Kecamatan Tondong Tallasa	28.274.075	26.000.000
38	Kecamat an Bungoro	85.784.800	80.000.000
39	Kecamatan Labakkang	123.585.000	61.300.000
40	Kecamatan Ma'rang	57.799.000	57.000.000

41	Kecamatan Segeri	57.834.450	50.000.000
42	Kecamatan Mandalle	24.284.375	23.000.000
43	Kecamatan Lk.Tupabbiring	36.012.000	33.800.000
44	Kecamatan Lk.Tupabbiring Utara	26.875.000	14.492.000
45	Kecamatan Lk.Tangaya	37.097.100	29.000.000
46	Kecamatan Lk.Kalmas	28.638.200	28.600.000
47	Inspektorat Daerah	248.011.000	223.000.000
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	241.476.000	120.000.000
49	Badan Pengelola Keuangan Daerah	325.804.850	175.000.000
50	Badan Pendapatan Daerah	189.319.100	110.000.000
51	Instalasi Farmasi		
52	Puskesmas Padang Lampe	12.540.840	3.000.000
53	Puskesmas Lk.Tupabbiring	62.069.950	4.750.000
54	Puskesmas Sabutung	55.693.750	2.900.000
55	Puskesmas Ma'rang	66.469.550	5.000.000
56	Puskesmas Taraweang	71.549.465	4.900.000
57	Puskesmas Bowong Cindea	61.573.410	3.800.000
58	Puskesmas Segeri	59.928.500	5.900.000
59	Puskesmas Labakkang	67.643.750	5.500.000
60	Puskesmas Bonto Perak	64.900.462	4.600.000
61	Puskesmas Minasate'ne	76.747.200	8.000.000
62	Puskesmas Sarappo	63.098.050	3.500.000
63	Puskesmas Kalabbirang	62.95.000	4.400.000
64	Puskesmas Bantimala	72.554.430	5.750.000
65	Puskesmas Kota Pangkajene	75.359.500	4.600.000
66	Puskesmas Pundata Baji	65.082.070	4.500.000
67	Puskesmas Balocci	79.775.480	5.015.000
68	Puskesmas Bungpro	82.475.170	8.130.000
69	Puskesmas Baring	53.436.471	4.800.000
70	Puskesmas Mandalle	54.811.700	7.000.000
71	Puskesmas Lk.Tangaya	68.536.180	6.000.000
72	Puskesmas Lk.Kalmas	82.135.200	7.000.000
73	Puskesmas Pamantauang	54.219.000	8.300.000
74	Puskesmas Sailus	63.828.300	6.400.000
75	Bagian Adm.Pembangunan	23.765.660	19.900.000
76	Bagian Adm.Perekonomian dan SDA	79.273.139	59.000.000
77	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	72.500.794	28.000.000
78	Bagian Keuangan Sekda	418.626.252	
79	Bagian Umum	479.224.697	270.000.000
80	Bagian Kesra dan Masyarakat	32.898.828	17.000.000
81	Bagian Humas dan Protokol	185.754.388	20.000.000
82	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	51.208.385	29.000.000
83	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	33.459.000	31.300.000
84	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	167.434.589	60.000.000

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID